

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sejak Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan otonomi daerah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004), maka setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri, termasuk didalamnya mengenai keuangan daerah. Sejalan dengan itu Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan reformasi pengelolaan keuangan negara dengan mengeluarkan Undang-Undang bidang keuangan Negara (UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 Tahun 2004 dan UU No 15 tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara), tata cara pelaporan keuangan pemerintah yang dirasakan kurang transparan dan akuntabel telah berubah, karena sebelumnya laporan keuangan tersebut belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara internasional.

Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Asas umum pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat; dan
2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengurus dan mengatur pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan keuangan daerah yang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada publik melalui penyajian laporan keuangan. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) mewajibkan Pemda untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku internal auditor dan pembina Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjawab tuntutan tersebut di atas sekaligus memfasilitasi Pemda dengan merancang suatu sistem informasi terintegrasi yang disebut Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan. Peran dan fungsi SIMDA Keuangan telah membantu pengelolaan keuangan daerah, sehingga wajib diawasi dan ditingkatkan penerapannya.

Dalam rangka mengoptimisasi manajemen keuangan daerah, saat ini Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengembangkan

aplikasi komputer berupa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Tujuan dari pengembangan program aplikasi SIMDA ialah:

- (1) Menyediakan database tentang kondisi di daerah secara terpadu mulai dari aspek kepegawaian, aset daerah, keuangan hingga pelayanan publik,
- (2) Menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah yang dapat digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan,
- (3) Mempersiapkan aparat daerah untuk mampu menguasai dan mendayagunakan teknologi informasi, dan
- (4) Memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, untuk membantu pengelolaan data yang lebih *cepat, efektif dan efisien*.

SIMDA Keuangan merupakan perangkat lunak yang dikembangkan dengan tujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan keuangan secara *cepat, efisien, efektif* dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mulai dari penyusunan anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD. Aplikasi SIMDA dapat diimplementasikan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi di SKPD, *sehingga mempunyai keuntungan yaitu: Pengendalian transaksi terjamin, efisiensi dalam melakukan penatausahaan, hanya membutuhkan satu kali input data transaksi sehingga menghemat waktu, tenaga dan biaya, serta cepat, akurat dan efisien dalam menghasilkan informasi keuangan.*

Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah menerapkan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) sebagai sistem informasi pengelola keuangan dan sistem informasi pelaporan keuangan. Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung menerapkan SIMDA sebagai sistem informasi manajemen yang lebih luas dari berbagai subsistem yang ada dalam SIMDA tersebut. Salah satu paket aplikasi SIMDA yang diterapkan oleh Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung yaitu SIMDA Keuangan, yang membantu Kecamatan Cicalengka mengolah data keuangan serta melaporkan data keuangan tersebut ke instansi di atasnya (Pemerintah Kabupaten Bandung). Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung telah menerapkan SIMDA sejak tahun 2014. Diawal penerapannya sistem ini masih menemui beberapa kendala teknis terkait dengan proses penginputan sampai proses pelaporan keuangan, akan tetapi output yang dihasilkan oleh sistem ini lebih terstruktur daripada penyusunan dengan sistem manual.

Oleh karena itu, dirasa perlu melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana SIMDA Keuangan sebagai sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang efektif dan efisien dapat mempermudah tugas pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah, pengendalian intern sistem yang diterapkan guna mencapai tujuan pelaporan, dan cakupan analisa kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem tersebut pada sebuah usulan penelitian dengan judul :

***“Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Sistem Informasi Manajemen Daerah***

***(Simda) Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan SKPD: Studi Kasus di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.”***

**1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) efektif dan efisien terhadap Kualitas informasi Laporan Keuangan SKPD di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung?

**1.3 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah, maka penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan efektif meningkatkan kualitas Laporan Keuangan SKPD di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung?
2. Apakah penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan efisien meningkatkan kualitas Laporan Keuangan SKPD di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung?
3. Apakah penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan efektif dan efisien meningkatkan kualitas Laporan Keuangan SKPD di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung?

## **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian yang penulis lakukan akan dijelaskan secara rinci pada subbab berikutnya :

### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti bermaksud menganalisis tingkat keefektifan dan keefisienan Simda Keuangan terhadap kualitas informasi Laporan Keuangan SKPD.

### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Mengetahui apakah penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan secara efektif dapat meningkatkan kualitas Laporan Keuangan SKPD di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung?
2. Mengetahui apakah penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan secara efisien dapat meningkatkan kualitas Laporan Keuangan SKPD di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung?
3. Mengetahui apakah penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan secara efektif dan efisien dapat meningkatkan kualitas Laporan Keuangan SKPD di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung?

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut :

### **1.5.1 Kegunaan Secara Teoritis**

- a. Menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti mengenai implementasi Sistem Manajemen informasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Sebagai wahana bagi peneliti untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari serta, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

### **1.5.2 Kegunaan secara praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, saran dan masukan bagi OPD di lingkungan Kabupaten Bandung dalam rangka mengoptimalkan penerapan sistem informasi manajemen daerah untuk meningkatkan kualitas laporan pemerintah daerah.

## **1.6 Tempat/Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Cicalengka yang berlokasi di Jalan Raya Timur No. 344 Cicalengka Tlp/Fax. (022) 7949205 Cicalengka 40395 Kabupaten Bandung, serta di 12 (duabelas) desa. yang berada di Kecamatan Cicalengka.